

POLITIK KEKERABATAN DALAM PROSES PENCALONAN LEGISLATIF PEMILU 2009

Muhtar Haboddin

Universitas Brawijaya, Jl. Veteran Malang 65145 Indonesia
muhtar_haboddin@ub.ac.id

Abstrak

Politik kekerabatan atau klan sangat kental terjadi dalam panggung politik, baik ditingkat nasional maupun lokal. Tulisan ini mencoba menghadirkan jejak langkah politik kekerabatan yang terjadi pada pencalonan anggota legislatif dalam pemilu 2009. Hal ini ditandai oleh banyaknya petinggi partai yang memasukkan anak, ipar, menantu, istri dan saudara dalam pencalonan anggota legislatif dalam pemilu 2009. Tulisan ini dalam batas tertentu berhasil membuktikan para petinggi partai politik yang berhasil memasukkan anak dan keluarganya dalam pesta pemilu. Dalam mengkaji politik kekerabatan, penulis menggunakan perspektif pilihan rasional dan perspektif nepotisme. Pilihan dua pendekatan ini dasari oleh pemahaman bahwa kajian ini belum banyak dilakukan dalam studi politik dan pemerintahan. Hasilnya sangat menakjubkan—dalam artian proses politik kekerabatan menyebar disejumlah partai politik.

Kata kunci: Politik Kekerabatan, Calon legislatif, dan Pemilu

Abstract

Political kinship or clan is very strong place in politics, both national and local. This paper tries to present the political footsteps of kinship that occurs in legislative candidacy in the 2009 election. It is characterized by a number of party officials that included children, brother-in-law, his wife and brother in the nomination of members of the legislature in the 2009 election. This paper proved the extent of political party officials who managed to put children and their families in the party elections. In reviewing the politics of kinship, the authors use rational choice perspective and the perspective of nepotism. Choice of two approaches underlying the understanding that this study has not been done in the study of politics and government. The results were amazing-in the sense of kinship to spread the political process in several political parties.

Keywords: Political Kinship, legislative candidates, and election

Garis keturunan atau klan kembali menguat dalam daftar calon legislatif (caleg) pemilu 2009. Penempatan keluarga dan kerabat dalam caleg pada pemilu 2009 mengingatkan kita pada pemilu 2004. Pada pemilu 2004 banyak petinggi partai yang menempatkan keluarga dan kerabatnya pada posisi-posisi kunci yakni nomor jadi. Nomor urut jadi atau nomor topi selalu diperuntukkan kepada keluarga atau kerabat para petinggi partai politik.

Kentalnya politik kekerabatan dalam politik Indonesia sudah menjadi rahasia umum. Fakta menunjukkan bahwa panggung politik, baik tingkat nasional maupun tingkat lokal disesaki oleh para caleg yang memiliki hubungan darah dengan petinggi partai. Sebut saja keluarga Megawati di PDIP, Amien Rais di PAN, Usman Al Hadar di PPP, Yusril Ihza Mahendra di PBB, Susilo Bambang Yudoyono di Demokrat adalah fakta bahwa

wajah caleg pemilu 2009 penuh dengan nuansa politik kekerabatan.

Kehadiran para caleg ini mengundang reaksi yang cukup beragam. Ada yang menilai fenomena ini sebagai upaya pelestarian kekuasaan. Karena itu, Amich Alhumami menyebutnya dengan ungkapan: *blood is thicker than water*—darah lebih kental dari air. Sementara pengamat lain mengomentarnya sebagai wujud kegagalan partai dalam melakukan kaderisasi. Tulisan ini akan membedah praktik politik kekerabatan dengan menggunakan perspektif pilihan rasional dan nepotisme. Selanjutnya, pada bagian yang lain akan menampilkan data empirik dari praktek politik kekerabatan pada pemilu 2004 dan 2009. Tidak hanya itu, tulisan ini juga akan dilengkapi dengan tanggapan pro—kontra sekaligus digenapi dengan beberapa bahaya yang akan terjadi dalam tubuh partai politik bila praktek politik kekerabatan ini dilembagakan. Sebagai penutup, tulisan ini menyodorkan tawaran solusi dalam praktik politik kekerabatan.

Dua Titik Pijakan

Politik Kekerabatan sebagai Pilihan Rasional

Politik kekerabatan akan dipotret dengan menggunakan perspektif pilihan rasional. Perspektif ini mengandaikan bahwa segala tindakan seseorang didasari dengan pertimbangan untung dan rugi. Pertimbangan semacam ini senantiasa dipraktekkan oleh para pengambil keputusan—pemilih—politisi—calon

legislatif, dan birokrat¹. Mengingat, salah satu premis utama dari perspektif pilihan rasional adalah para aktor akan berusaha mencari keuntungan buat mereka sendiri².

Pandangan yang hampir sama juga disampaikan oleh Rizal Mallarangeng. Menurut Rizal, individu adalah pelaku rasional yang selalu bertindak untuk mencapai kepentingan sendiri³. Ia melakukan hal itu dalam situasi terbatasnya *resource*.⁴ Di arena politik, para aktor politisi bertindak semata-mata untuk memperbesar kekuasaan yang mereka miliki. Pemahaman ini relevan dalam memotret proses pengisian caleg pemilu 2009 oleh para petinggi partai dengan memasukkan istri, anak, saudara, ipar, dan mertua merupakan pilihan rasional. Hal ini dilakukan karena para petinggi partai sadar betul bahwa pilihan memasukkan keluarga dan kerabat merupakan strategi memperbesar kekuasaan.

Jika pemahaman ini kita ikuti, tidaklah berlebihan apabila Franz Magnis Suseno berkata para politisi adalah orang-orang yang mengutamakan dirinya⁵. Demi memperbesar pengaruh kekuasaannya, mereka dengan sengaja menyalagunakan kedudukannya atau jabatannya dalam

¹ Jack C. Plano dkk *Kamus Analisa Politik*, Jakarta: Rajawali Press, 1985. hlm. 208

² Mohtar Mas'ood *Politik, Birokrasi dan Pembangunan*, Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 1994. hlm.88.

³ Rizal Mallarangeng *Mendobrak Sentralisme Ekonomi*: Jakarta: KPG, 2002. hlm. 9

⁴ Miriam Budiarjo *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 2008. hlm. 93

⁵ Franz Magnis Suseno *Filsafat Kebudayaan Politik*, Jakarta: Gramedia, 1992. hlm. 115.

struktur partai demi kepentingan pribadi dan golongannya.

Nepotisme: Strategi Bekerjanya Politik Kekkerabatan

Cara lain untuk membaca politik kekkerabatan adalah dengan menggunakan perspektif nepotisme. Nepotisme merupakan salah satu strategi bekerjanya politik kekkerabatan di ranah kekuasaan. Dikatakan demikian, karena pada dasarnya nepotisme meminjam pendapat Jeremy Pope diartikan seseorang menggunakan jabatannya untuk memperoleh keuntungan—sering dalam bentuk pekerjaan—bagi anggota keluarganya⁶.

Pada bagian lain, Pope mengatakan:

” nepotisme pada dasarnya ikut mendorong atau ikut serta dalam penerimaan, pengangkatan, pengangkatan kembali, kenaikan pangkat anggota keluarga dekat atau teman dekat dalam jabatan pemerintahan, atau dalam lembaga yang dipimpin atau dikendalikan⁷.

Kebijakan mengutamakan keluarga seakan-akan adalah hak proregatif pimpinan partai. Sebuah kebijakan yang amat lumrah dipraktikkan oleh siapa pun. Pada masa Orde Baru semangat nepotisme para petinggi partai berjalan masif. Afan Gaffar secara kritis mencatat fenomena ini, dengan mengatakan ada banyak anak-anak pejabat yang menduduki posisi kunci dalam partai politik. Mereka menempati posisi strategis dalam Golkar, baik di tingkat nasional

maupun di daerah⁸.

Masuk para anak-anak pejabat dalam kekuasaan sudah barang tentu tidak melewati jalur resmi dan proses alamiah. Artinya mereka masuk melalui koneksi politik dan sejumlah kemudahan. Proses ini bisa dikategorikan tidak sehat karena mereka masuk bursa caleg bukan hasil dari kompetisi sehat yang terbuka⁹. Akibatnya, para kader yang merintis dari bawah sulit untuk muncul. Bahkan, kader yang paling memenuhi syarat pun tidak akan memperoleh promosi menjadi caleg sebagai konsekuensi dari penerapan mekanisme nepotisme.

Pada titik inilah, akan banyak aktivis partai yang akan tersingkir. Tersingkirnya mereka karena nepotisme akan menimbulkan konflik loyalitas dalam organisasi partai. Penunjukan atau penempatan kerabat—sanak keluarga atau tokoh hendaknya tetap mengedepankan semangat kompetisi dan kompetensi yang juga merupakan prinsip dari demokrasi itu sendiri. Kita tidak ingin Indonesia menjadi ‘negara teater’ seperti dikatakan Cliffod Geertz, yang lebih mengedepankan kekkerabatan dan kekeluargaan. Elit partai sebagai pemilik, sementara masyarakat hanya sebagai penonton¹⁰.

Apa yang dikatakan Cliffod Geertz, dibenarkan oleh pengamat politik dari

⁶ Jeremy Pope *Strategi Memberantas Korupsi*, Jakarta: YOI, 2007. hlm. 362.

⁷ *Ibid*, hlm. 364.

⁸ Afan Gaffar *Politik Indonesia*, Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2000. hlm. 117.

⁹ Soemitro ‘Anak Pejabat di DPP Golkar’ Togi Simanjuntak *Abri Punya Golkar* Jakarta: ISAI, 1996. hlm. 119.

¹⁰ Tajuk Rencana ‘Mewariskan Kekuasaan’ *Kompas*, 21 Oktober 2008

Universitas Islam Jakarta, Saiful Mujani.
Menurutnya:

”partai politik saat ini hanyalah partai teater yang terpusat dari elit partai. Di partai model seperti ini, tokoh yang memegang peran utama adalah bapak, ibu, anak, menantu, serta kroni-kroni lainnya. Sedangkan kader dan simpatisan lainnya hanya sebagai penonton dan penikmat semata”¹¹.

Sejalan dengan pemikiran tersebut, patut pula dicatat bahwa larangan nepotisme tidak berarti ’tertutup bagi anggota keluarga’, tetapi memang melarang pegawai negeri menggunakan atau menyalagunakan kedudukannya dalam untuk memberikan pekerjaan bagi anggota keluarganya. Tujuan larangan itu bukan untuk mencegah anggota keluarga bekerja bersama-sama, tetapi untuk mencegah sang pemimpin mendahulukan anggota keluarga, dalam menggunakan wewenang subjektif atas nama publik¹².

Politik Keekerabatan Dua Pemilu Terakhir

1. Pemilu 2004

Sejarah telah menggoreskan bahwa pemilu 2004 diwarnai dengan aroma politik keekerabatan. Politik keekerabatan telah menjangkiti partai besar maupun partai kecil. Hasil liputan *Jawa Pos* memberitakan beberapa petinggi partai berlomba-lomba mencalonkan keluarga dalam pengisian caleg. Misalnya:

”Hamzah Haz mencalonkan anak dan menantunya. Gus Dur, Taufik Kiemas dan Pramono Anung memasang adik kesayangannya. Yang menarik ada pasangan caleg (PPP) seperti Yunus

¹¹ <http://suaramerdeka.com/smcetak/index.php?fuseaction>.

¹² Jeremy Pope, *op.cit.* hlm.362.

Yosfiah-Antonio Richardo, Tosari Wijaya-Ujiati dan Anawi latif-Mahsanah. Praktik seperti ini bukan hanya monopoli partai besar, tetapi juga dilakukan partai-partai kecil. Sjahrir mencalonkan istrinya, Kartini Panjaitan; Eros Djarot memasang Kakak dan anak sendiri¹³.

Fakta di atas diperkuat lagi pada tabel 1 yang berisikan data hasil olahan dari berbagai sumber. Karena itu, menggabungkan antara liputan *Jawa Pos* dengan hasil penelusuran penulis dari berbagai sumber akan memperkaya pemahaman kita terhadap praktik politik keekerabatan. Menguatnya praktik politik keekerabatan dalam proses pencalonan anggota legislatif menandakan elit-elit parpol ingin memelihara geneologi politik di kalangan anggota keluarganya sendiri. Bagi para elit partai parpol menjaga geneologi politik itu amat perlu, terutama berkaitan dengan dua kepentingan strategis, yaitu merawat trah kekuasaan serta menjaga keberlangsungan karier politik; dan mempertahankan penguasaan atas akses ke sumber-sumber ekonomi dan finansial¹⁴. Dalam bahasa Anwar Thosibo—setiap aktor politik akan mementingkan kesejahteraan diri dan keluarganya sendiri.

Tabel 1 nampak bahwa para petinggi partai dengan sengaja menempatkan anak, saudara dan istri rata-rata pada nomor jadi yakni nomor 1. Sebagaimana dipraktikkan oleh PNBK, PDIP, PIB, dan PBR. Selanjutnya, tabel ini juga mengungkap fakta bahwa kecenderungan menempatkan

¹³ *Jawa Pos*, 6 Januari 2004

¹⁴ mich Alhumami ’Politik Keekerabatan’ *Kompas*, 23 Januari 2004

Tabel 1
Politik Keekerabatan Pemilu 2004

Nama	Partai	Daerah	Urut
Banyu Biru (anak Eros Djarot)	PNBK	Kalimantan Selatan	1
Slamet Raharjo (Kakak Eros Djarot)	PNBK	Jawa Barat 2	1
Guruh Soekarno P	PDIP	Jawa Timur 6	1
Taufiq Kiemas	PDIP	Jawa Barat 2	1
Nazaruddin Kiemas (adik Taufiq)	PDIP	Sumatra Selatan 1	1
Santayana Kiemas	PDIP	Banten 1	4
Nur Agus Haz (anak Hamzah Haz)	PPP	DKI Jakarta 1	3
Zain Badjeber (anak H Fahrizal Zain Badjeber)	PPP	Jawa Tengah 6	4

Diperoleh dari banyak sumber

anak, saudara, dan istri merupakan gejala politik yang akrab terjadi pada masa Orde Baru dan mungkin masa sebelumnya. Di era Soeharto, ia pernah mengangkat putrinya sebagai Ketua DPP Golkar dan ditunjuk sebagai menteri. Seorang pengusaha dekatnya ditunjuk sebagai anggota kabinet. Di era yang sama, beberapa sanak keluarga pejabat atau tokoh ditunjuk menjadi anggota MPR sebagai utusan golongan¹⁵.

Kini era sudah berganti. Tetapi, *toh* semangat politik keekerabatan belum berubah—malah pondasinya masih kuat. Bahkan, perilaku elit-elit partai kini tak beda dengan Soeharto dulu. Pada era Orde Baru pemimpin partai sekarang mengecam keras politik keekerabatan yang dipraktikkan oleh Soeharto, tapi saat ini ia pun mengangkat anak, saudara, istri, dan kroninya menjadi caleg. Padahal mereka mengklaim dirinya

sebagai pengawal reformasi dan pejuang demokrasi¹⁶.

Jika demikian faktanya, kita bisa mengatakan bahwa era Orde Baru dan era reformasi sama saja. Sama dalam pengertian perilaku elitnya melakukan praktik-praktik nepotisme. Bahkan, pada skala tertentu politik keekerabatan masa kini jauh lebih banyak dari sisi jumlah aktor. Hal ini bisa dipahami karena jumlah partai dan pelaku aktor jauh lebih banyak ketimbang periode Orde Baru yang hanya memiliki tiga partai, yakni Golkar, PPP, dan PDI.

2. *Pemilu 2009: Proses pengulangan*

Kini sejarah terulang kembali. Realitas empirik menunjukkan bahwa praktik politik keekerabatan masih mewarnai pemilu kali ini. Hal ini dimungkinkan karena ada beberapa pelaku masih sama,

¹⁵ Tajuk Rencana, *op.cit*

¹⁶ Amich Alhumami, *op.cit*.

selebihnya adalah pendaftar baru di panggung politik. Baik aktor lama maupun pendaftar baru mereka sama-sama memiliki tabiat untuk mengutamakan sanak keluarga dalam rekrutmen caleg.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa proses seleksi caleg sebagian besar parpol di Tanah Air masih mengutamakan kedekatan personal/keluarga caleg dengan pengurus partai¹⁷. Dengan kata lain, daftar usulan calon anggota legislatif pemilu 2009 dipenuhi orang yang punya hubungan keluarga dengan elit politik/pimpinan parpol. Penyusunan politik kekerabatan ini sangat merisaukan karena menunjukkan kian menguatnya politik keluarga¹⁸.

Penjelasan ini cukup beralasan seiring dengan hadirnya generasi kedua atau ketiga dalam satu keluarga besar. Sebagai contoh, politik kekerabatan yang mengarah pada dinasti keluarga dengan muncul generasi ketiga atau cucu Bung Karno dalam daftar caleg. Dua cucu Bung Karno yakni Puan Maharani dan Puti Guntur menjadi calon anggota DPR dari PDIP, juga menetapkan Megawati sebagai calon presiden pemilu 2009. Selain itu, sejumlah keluarga Megawati juga menjadi caleg di PDIP¹⁹.

Untuk menguatkan pemaparan di atas, fakta empirik tertuang pada tabel 2. Tabel ini menjelaskan keterlibatan sejumlah petinggi partai dalam praktik politik

kekerabatan. Di partai Golkar, sang Ketua Umum memasang Adiknya. Hal yang sama juga dipraktikkan Agung Laksono dan Theo Sambuaga dengan membawa anaknya. Apa yang dilakukan oleh PDIP dan Golkar juga terjadi Partai Demokrat di mana anak SBY tiba-tiba muncul begitu saja tanpa pernah kita tahu keaktifannya di PD. Sekalipun demikian, kehadiran Anak SBY tidak terlalu mengejutkan jagat politik sebab SBY adalah Ketua Dewan Pembina sementara Hadi Utomo adalah adik ipar SBY sekaligus Ketua Umum PD.

Pada kolom berikutnya mata tertuju pada PAN. Partai yang didirikan oleh Amien Rais, sang tokoh penggerak reformasi ternyata tidak menunjukkan spirit seorang reformis dalam arti bebas nepotisme. Dalam daftar caleg pemilu 2009 ada dua keluarga Amien Rais yang diusung oleh PAN akan ikut bertarung, yakni adiknya dan anaknya sendiri. Kehadiran putra Amien bisa dibaca sebagai proses regenerasi dalam keluarganya sendiri. Artinya buah yang jatuh tidak jauh dari pohonnya. Begitulah kata pepatah. Ungkapan ini menunjukkan bahwa seorang anak politisi atau tokoh partai politik cenderung akan diikuti oleh anaknya.

Yang paling mengejutkan dari tabel ini adalah partai Hanura dan PPP. Kedua partai ini mengusung istri Ketua Umum masing-masing. Sebuah kejadian yang tidak lumrah dalam panggung politik Indonesia. Kita tidak tahu pasti apakah pencalonan isti Wiranto dan Suryadharma Ali terinspirasi oleh praktik yang dilakukan PDIP. Terlepas

¹⁷ Syamsuddin Haris 'Suara Terbanyak dan Kualitas Parlemen' *Kompas*, 5 Januari 2009

¹⁸ Amich Alhumami 'Politik Kekerabatan: Darah Lebih Kental dari Air' *Gatra*, 19 November 2008

¹⁹ Politik Keluarga Amat Berbahaya, *Kompas*, 20 Oktober 2008

Tabel 2 Politik Kekerabatan
Pemilu 2009

Nama	Partai	Daerah	Urut
Halim Kalla (adik Kalla Ketum)	Golkar	Sulawesi Selatan 2	11
Agung Laksono Wakil Ketua Partai Golkar	Golkar	Jakarta 1	1
Dave Laksono (putra Agung Laksono)	Golkar	Jawa Barat 2	12
Agus Gimawang (anak Ginanjar Kartasasmita)	Golkar	Jawa Barat 2	1
Agus Guriya Kartasasmita (Adik)	Golkar	Jawa Barat 10	1
Jerry Ak Sambuaga (anak Theo Sambuaga)	Golkar	DKI Jakarta 2	7
Andi Rio (Menantu Andi Mattala)	Golkar	Sulawesi Selatan	4
Fazwan Chairul Azwar (Anak Rully Chairul Azwar)	Golkar	DKI Jakarta	14
Eka Sastra (Keponakan Aksa Makmud)	Golkar	Sulawesi Selatan	9
Guruh Soekarno P	PDIP	Jawa Timur 1	1
Taufiq Kiemas	PDIP	Jawa Barat 2	1
Puan Maharani (anak Ketum)	PDIP	Jawa Tengah 5	1
Puti Guntur (keponakan Ketum)	PDIP	Jawa Barat 10	2
Nazaruddin Kiemas (adik Taufiq)	PDIP	Sumutra Selatan 1	1
Maruarar Sirait (putra tokoh PDIP Sabam Sirait)	PDIP	Jawa Barat 9	10
Natashya Alexandra (anak Alex Litay)	PDIP	Jakarta Selatan	
Edi Baskoro (putra SBY)	Demokrat	Jawa Timur	11
Hadi Utomo (Ketum PD dan ipar SBY)	Demokrat		
Raguyuna Usman (istri Ketum Wiranto)	Hanura	Gorontalo	1
Ahmad Muntas Rais (anak Amien Rais)	PAN	Jawa Tengah 8	1
AbdulRozaq Rais (adik)	PAN	Jawa Tengah 4	1
Suryadharma Ali Ketum PPP	PPP	Jawa Barat 2	1
Wardatul Asriah (istri)	PPP	Jawa Barat 7	1
Usman Al Hadar	PPP	Jawa Timur 2	1
Emilia Kontesa (istri)	PPP	Jawa Timur 2	6
Denada (anak)	PPP	Jawa Timur 5	2
Yusron Ihza (Adek Yursil)	PBB	Bangka Belitung	1

Diolah dari berbagai sumber.

dari logika inspirasi, kehadiran para istri pimpinan partai dalam proses pencalonan legislatif 2009 semakin membenarkan argumen Pope yang mengatakan:

Siapa saja yang menempati posisi penting dalam dunia politik akan selalu dikelilingi oleh sanak saudara dan teman-teman yang mengharapkan patronase dari dia, tradisi yang sudah berusia berabad-abad. Mereka yakin akan mendapatkan pekerjaan dari dia, jika tidak ada pekerjaan, pekerjaan akan diciptakan. Politisi mungkin memahami UUD, tetapi sulit baginya menjelaskan pada sanak keluarganya bahwa karir politiknya akan terancam dan bisa cepat berakhir. Patut pula diingat, bahwa para pejabat/petinggi partai akan dikejar oleh tuntutan-tuntutan yang tidak henti-hentinya, karena mereka terperangkap dalam jaringan kewajiban pada sanak saudara²⁰.

Pro Kontra Politik Kekerabatan

Tidak ada jawaban tunggal yang bisa dijadikan pijakan dalam memotret perilaku politik kekerabatan. Para pelaku dan politisi berselisih paham dalam membuat penilaian dan pembenaran terhadap kebijakan politiknya. Silang pendapat pun terjadi sebagaimana dilansir media massa. Peta politisi yang pro maupun kontra terhadap politik kekerabatan bisa digambarkan melalui sebaran wacana yang berkembang.

Kelompok Pro

Kelompok yang pro praktik politik kekerabatan tergambar dengan jelas melalui pemaparan data pada tabel 1 dan 2. Bahkan, dua tabel ini sudah cukup untuk mengatakan bahwa politisi seperti Megawati, Yusuf Kalla, SBY, Amien Rais, Hamzah Haz,

²⁰ Jeremy Pope, *op.cit.* hlm. 365.

Yusril Ihza Mahendra, dan Eros Djarot sekedar menyebutkan nama adalah politisi yang sedang merayakan praktik nepotisme. Melibatkan anggota keluarga dalam proses caleg seakan-akan tidak ada masalah. Hal ini nampak dalam sikap politiknya masing-masing pelaku. Untuk mengetahui sikap politik para pelaku, penulis akan menghadirkan beberapa kutipan berikut:

SBY secara tegas mengatakan putranya maju sebagai caleg karena memiliki kemampuan yang baik dari sisi akademisi dan juga ketertarikan pada dunia politik²¹.

Selanjutnya, *Suara Merdeka* menulis:

Sekretaris DPP PPP Lukman Hakim Syaifudin, mengatakan masuknya salah satu anak dan menantu Hamzah Haz dalam daftar calon legislatif (caleg) dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu dianggap bukan sebuah nepotisme karena kedua nama itu diusulkan dari cabang dan mendapat rekomendasi dari pimpinan wilayah. Kedua nama itu memang mempunyai kompetensi dan memadai untuk dicalonkan²².

Apa yang dipraktikkan SBY dan Hamzah Haz, ditiru pula oleh Amien Rais dan sejumlah tokoh lainnya. Ketua Badan Litbang DPP PAN Sayuti Asyathri mengakui kemungkinan anak-anak elite PAN menjadi caleg besar. Nepotisme dalam politik bukan lagi masalah sosial. Itu sudah masuk sistem hukum. Jadi, tidak ada halangan bagi partai untuk menempatkan orang-orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan karena kedudukan mereka adalah warga negara yang memiliki hak²³.

²¹ Media Indonesia.com/index.php?or.id=MzQzoti

²² <http://www.suaramerdeka.com/harian/0401/12/nas23.htm>

²³ http://mediaindonesia.com/index.php?ar_id=MjAwODg

Tiga kutipan tersebut membeberkan fakta bahwa politik kekerabatan sangat sulit untuk dibantah. Sekalipun, para pemimpin politik/politisi mencoba membangun basis argumentasi yang paling rasional untuk meyakinkan masyarakat terhadap kebenaran tindakannya. Dalam filsafat politik, kita mengenal ungkapan—meminjam pendapat Franz Magnis Suseno: *apa yang diomongkan oleh politisi sebenarnya tanpa relevansi bagi kehidupan yang nyata*²⁴.

Sikap kritis Franz dalam membaca perilaku para politisi mendapat perlawanan dari petinggi partai. Sekjen PDIP, Pramono Anung secara tegas mengatakan bahwa praktik politik kekerabatan tidak perlu dipermasalahkan²⁵. Sementara Afan Gaffar menafsirkan politik kekerabatan sebagai manifestasi keinginan untuk dikelilingi orangnya sendiri²⁶. Pada titik inilah analisis Cornelis Lay, yang mengatakan klan keluarga atau politik kekerabatan tidak bisa dihapus. Oleh karena itu, yang bisa dilakukan adalah membuat 'aturan main' dan 'standarisasi'²⁷ pencalonan legislatif dalam parpol.

Kelompok Kontra

Ternyata tidak semua politisi maupun petinggi partai politik bersuara tunggal dan pro terhadap praktik politik kekerabatan dalam proses pencalegan.

Dikatakan demikian, karena masih ada segelintir politisi yang bersikeras melakukan kritik terhadap praktik tersebut.

Ketua Umum Partai Golkar M Jusuf Kalla menegaskan tidak mungkin Halim Kalla menjadi caleg nomor 11 untuk dapil Sulsel kalau tidak berkualitas. Saya menolak nepotisme dalam arti seseorang diangkat menjadi pejabat publik oleh keluarga atau kerabatnya sendiri²⁸. Pernyataan JK layak diapresiasi sebagai sebuah sikap politik yang berkomitmen dalam membangun citra partai Golkar sebagai partai yang bersih nepotisme. Usaha JK ini tentu saja tidak populer dalam internal Golkar, tetapi seorang pemimpin selalu dituntut untuk bersikap demikian.

Sikap politik JK mempunyai kekuatan pemaksa karena ditopang dengan posisinya selaku Ketua Umum Golkar. Selain JK, sikap politik Hadimulyo juga patut diberi tempat. Fungsionaris PPP ini, prihatin dengan adanya politik keluarga di sejumlah partai, termasuk PPP. Jika tidak dikoreksi, citra PPP bisa tercederai²⁹. Atau dalam bahasa Daniel Sparingga politik kekerabatan akan membuat kredibilitas partai politik kian terpuruk dan masyarakat makin tidak percaya³⁰.

Langkah politik JK dan Hadimulyo sangat beralasan. Bukan saja karena membahayakan perkembangan demokrasi internal partai politik. Tetapi juga secara psikologis di internal partai, politik

²⁴ Franz Magnis Suseno, op.cit. hlm.117

²⁵ Kompas, op.cit.

²⁶ Afan Gaffar 'Politik Kulit Bawang Presiden Sipil' Togi Simanjuntak *ABRI Punya Golkar* Jakarta: ISAI, 1996. hlm. 107.

²⁷ Argumen ini disampaikan oleh Cornelis Lay dalam Seminar Bulanan di PSPK, tanggal 8 Januari 2009'

²⁸ inilah.com.

²⁹ www.Banjarmasinpos.co.id/index.pgp?option=com.content&task=view.

³⁰ *Ibid.*

kekerabatan akan menggeser kader potensial yang sudah lama berkorporasi dan mengabdikan pada partai. Mereka tergeser hanya karena tidak memiliki patron³¹.

Lima Bahaya Politik kekerabatan

Bangunan pikir tentang politik kekerabatan sebagaimana dipaparkan di atas ternyata tidak berjalan linear. Dalam politik kekerabatan itu sendiri, ternyata mengandung lima bahaya. Kelima bahaya dari praktik politik kekerabatan tersebut bisa dirangkum sebagai berikut: *Pertama*, politik kekerabatan akan membuat substansi demokrasi hilang lenyap karena hanya anggota keluarga yang berpeluang masuk ke dalam permainan politik. Sementara aktivis, tokoh masyarakat akan bermain di pinggiran dan tidak diberi peluang untuk diikutsertakan³².

Kedua, dalam tingkat yang berbeda-beda, nepotisme di lembaga legislatif akan beradu kuat dengan demokrasi, dan nepotisme akan menang dan demokrasi akan kalah. Asas demokrasi seperti kedaulatan rakyat akan diganti dengan "kedaulatan keluarga", hakikat Pemilu yang "luber" akan mempertajam pertentangan ini. Sistem politik hanya dapat menjadi demokratis jika ia muncul dari rakyat, dari pilihan bebas wakil-wakil rakyat. Jadi demokrasi mensyaratkan perwakilan yang dibentuk lewat sarana daya saing pilihan.

Ketiga, nepotisme caleg akan memunculkan politisi yang

tidak profesional. Mereka lebih banyak dibebani oleh semangat "mengabdikan" kepada patron ketimbang mengabdikan kepada rakyat. Akibatnya hidup politisi tergantung kepada patron dan diperparah lagi beban moral untuk melayani kepentingan golongan.

Keempat, proses pergantian yang digerakkan oleh perubahan menjadi langka. Meskipun para politisi ini terpilih melalui Pemilu, tetapi ukuran yang dipakai adalah *merit system*. Artinya format politik akan "membiakkan" politisi yang loyal kepada *establishment* dan *status quo* politik³³.

Kelima, politik kekerabatan tak sesuai dengan prinsip meritokrasi, karena proses rekrutmen politik didasarkan pada sentimen kekeluargaan, bukan kompetensi, rekam jejak, dan kinerja perorangan yang terbuka untuk diperdebatkan di wilayah publik. Jika terus berlanjut gejala ini bisa kontraproduktif bagi ikhtiar membangun sistem demokrasi modern³⁴.

Lima poin ini sangat dianjurkan untuk dijadikan larangan keras oleh para politisi dalam melakukan praktik politik kekerabatan. Larangan ini hanya bisa efektif apabila aturan main dalam tubuh partai politik dijalankan. Pertanyaan kita adalah dimanakah aturan main itu diletakkan? Jawabnya tentu saja di AD/ART partai itu sendiri.

Tawaran Solusi

Dari seluruh basis argumen dengan sebaran fakta menunjukkan bahwa politik

³¹ *Kompas*, 22 Oktober 2008

³² Bambang Cipto 'Indonesia Memasuki Era Politik Dinasti?' *Republika*, 17 Juni 1999.

³³ Faisal Siagian "Nepotisme Calon Legislatif" *Kompas*, 30 Januari 1997

³⁴ Amich Alhumami, *op.cit.*

kekerabatan sangat membahayakan eksistensi partai politik ke depan. Pola rekrutmen gaya nepotis tidak membawa kehidupan partai politik yang lebih baik. Oleh karenanya, dibutuhkan sejumlah terobosan baru dalam rangka menata ulang proses rekrutmen pengisian jabatan-jabatan politik di legislatif. Paling tidak, ada empat tawaran solusi yang bisa dilakukan.

Pertama, Partai politik harus merekrut kader-kader yang berkualitas yang dapat memimpin dan mengembangkan partai. Dengan demikian kader-kader yang berkualitas, partai dengan lebih mudah dapat menentukan kandidatnya untuk kepemimpinan nasional³⁵. *Kedua*, pola kaderisasi dan sistem pembinaan anggota di dalam partai harus dilakukan secara serius dan sistematis untuk membangun partai agar lebih baik. Untuk itu, partai harus didorong untuk memiliki sistem pelatihan dan pendidikan yang berkelanjutan bagi setiap anggotanya³⁶.

Ketiga, kader yang akan mencalonkan diri sebagai pejabat publik harus memiliki reputasi, rekam jejak, dan kapabilitas, sekaligus di topan dengan latar belakang pendidikan bidang politik atau hukum yang memadai.³⁷ *Keempat*, rekrutmen caleg harus melalui jalur sistem pengkaderan politik dari anak tangga yang terendah. Sistem itu itu harus demokratis dengan bersandar pada asas terbuka, bebas dari campur tangan kekuasaan, dan melalui kompetisi sehat

antarkader³⁸.

Empat politik ini mengisyaratkan perbaikan rekrutmen internal partai politik. Dengan mengedepankan kapasitas kualitas—rekam jejak dan penataan jenjang karir sangat diharapkan dalam mengelola partai politik. Kalau pun politik kekerabatan merupakan fakta sejarah yang sangat sulit dihindari maka para aktor politik harus menjamin bahwa, *pertama*, mereka harus membuktikan diri bahwa dirinya bukan kader katrol yang naik karena restu atau reputasi orangtua mereka. *Kedua*, mereka benar-benar kader handal yang mampu membebaskan diri mereka dari bayangan pola budaya kekuasaan era orangtua mereka dan mampu menjawab tangan zaman³⁹.

Simpulan

Politik kekerabatan merupakan kajian yang pantas untuk diperdalam, karena selama ini belum banyak referensi yang membahas tentang tema ini. Kelangkaan sumber mengisyaratkan bahwa kajian ini harus diberi tempat dan ruang dalam khazanah perdebatan akademis. Dengan berpijak pada argumen ini, tulisan ini merupakan awalan dari penulisan politik kekerabatan di ranah politik praktis, khususnya proses pencalonan anggota legislatif.

Padahal setiap ritual lima tahunan, praktik politik kekerabatan selalu hadir dan bahkan aromanya sangat kuat dalam proses caleg. Pelakunya sudah bisa ditebak yakni pembesar partai, para petinggi dan

³⁵ *Studi Kasus dan Pembelajaran dari Parpol di Indonesia* Jakarta: Puskapol-IRI, 2008. hlm.41.

³⁶ *Ibid*, hlm 121.

³⁷ Syamsuddin Haris 'Nepotisme Mengancam Demokrasi' *Kompas*, 20 Oktober 2008.

³⁸ Soemitro, *op.cit*.hlm. 119

³⁹ *Ibid*, hlm. 120.

pemimpin partai politik. Praktik semacam ini akan terus berlangsung tanpa bisa kita kendalikan. Bila hal ini terus dibiarkan maka tidak menutup kemungkinan para anggota legislatif merupakan kumpulan

para keluarga besar. Fenomena ini perlu disikapi secara kritis karena akan menjadi tantangan besar bagi proses demokrasi di Indonesia: kini dan masa yang akan datang.

Daftar Pustaka

- Budiarjo Miriam. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia.
- Cipto, Bambang. 'Indonesia Memasuki Era Politik Dinasti?' *Republika*, 17 Juni 1999.
- Gaffar, Afan. 2003. *Politik Indonesia*, Jogjakarta: Pustaka Pelajar.
- Haris, Syamsuddin. 'Suara Terbanyak dan Kualitas Parlemen' *Kompas*, 5 Januari 2009
- _____, 'Nepotisme Mengancam Demokrasi' *Kompas*, 20 Oktober 2008.
- Mallarangeng, Rizal. 2002. *Mendobrak Sentralisme Ekonomi*: Jakarta: KPG,
- Mas'ood, Mohtar. 1994. *Politik, Birokrasi dan Pembangunan*, Jogjakarta: Pustaka Pelajar.
- Pope, Jeremy. 2007. *Strategi Memberantas Korupsi*, Jakarta: YOI, 2007.
- Plano, Jack C. Dkk, 1985. *Kamus Analisa Politik*, Jakarta: Rajawali Press.
- Puskapol. *Studi Kasus dan Pembelajaran dari Parpol di Indonesia*, 2008. Jakarta: Puskapol-IRI.
- Simanjuntak, Togi. 1996. *ABRI Punya Golkar* Jakarta: ISAI.
- Suseno, Franz Magnis. 1992. *Filsafat Kebudayaan Politik*, Jakarta: Gramedia.

Koran dan Internet

Alhumami, Amich. 'Politik Kekerabatan' *Kompas*, 23 Januari 2004

_____, 'Politik Kekerabatan: Darah Lebih Kental dari Air' *Gatra*, 19 November 2008

Jawa Pos, 6 Januari 2004

Kompas, 20, 21 dan 22 Oktober 2008
Media Indonesia.com/index.php?or.id=MzQzoti

<http://suamerdeka.com smcetak/index.php?fuseaction>.

<http://www.suamerdeka.com/harian/0401/12/nas23.htm>

http://mediaindonesia.com/index.php?ar_id=MjAwO

inilah.com.

[Www. Banjarmasinpos.co.id/index.pgp?option=com.content&task=view](http://Www.Banjarmasinpos.co.id/index.pgp?option=com.content&task=view).

Siagian, Faisal. 'Nepotisme Calon Legislatif' *Kompas*, 30 Januari 1997